REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
INSPEKTORAT JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **GEDE PASEK SUARDIKA**
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BUDI KARYA SUMADI**
Jabatan : Menteri Perhubungan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Agustus 2021

PIHAK KEDUA MENTERI PERHUBUNGAN	PIHAK PERTAMA, INSPEKTUR JENDERAL
BUDI KARYA SUMADI	**GEDE PASEK SUARDIKA** Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 196307171989031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	Pengawasan intern yang memberikan nilai tambah	1.	Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan	Opini	WTP
2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	2.	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan	Nilai	77,5
3	Meningkatnya layanan pengawasan	3.	Tingkat kepuasan pengawasan oleh Auditi	Persentase	65
		4.	Persentase tindak lanjut penanganan konsultasi pengawasan tepat waktu	Persentase	80
		5.	Persentase tindak lanjut pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan	Persentase	85

Kegiatan :	**Anggaran :**
1. Pelaksanaan Pengawasan Internal	Rp 16.647.112.000,-
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM Pengawasan	Rp 3.421.738.000,-
3. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Pengawasan	Rp 52.330.080.000,-
4. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Pengawasan	Rp 3.508.153.000,-
5. Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama Pengawasan	Rp 531.016.000,-
6. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Pengawasan	Rp 1.063.938.000,-
7. Legislasi dan Legitimasi Pengawasan	Rp 742.427.000,-

Disetujui,
MENTERI PERHUBUNGAN

BUDI KARYA SUMADI

Jakarta, 31 Agustus 2021
INSPEKTUR JENDERAL

GEDE PASEK SUARDIKA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630717 198903 1 002

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
INSPEKTORAT JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **GEDE PASEK SUARDIKA**
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BUDI KARYA SUMADI**
Jabatan : Menteri Perhubungan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Agustus 2021

PIHAK KEDUA MENTERI PERHUBUNGAN	PIHAK PERTAMA, INSPEKTUR JENDERAL
BUDI KARYA SUMADI	**GEDE PASEK SUARDIKA** Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 196307171989031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	Pengawasan intern yang memberikan nilai tambah	1.	Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan	Opini	WTP
2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	2.	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan	Nilai	77,5
3	Meningkatnya layanan pengawasan	3.	Tingkat kepuasan pengawasan oleh Auditi	Persentase	65
		4.	Persentase tindak lanjut penanganan konsultasi pengawasan tepat waktu	Persentase	80
		5.	Persentase tindak lanjut pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan	Persentase	85

Kegiatan :	**Anggaran :**
1. Pelaksanaan Pengawasan Internal	Rp 16.647.112.000,-
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM Pengawasan	Rp 3.421.738.000,-
3. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Pengawasan	Rp 52.330.080.000,-
4. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Pengawasan	Rp 3.508.153.000,-
5. Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama Pengawasan	Rp 531.016.000,-
6. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Pengawasan	Rp 1.063.938.000,-
7. Legislasi dan Legitimasi Pengawasan	Rp 742.427.000,-

Disetujui,
MENTERI PERHUBUNGAN

BUDI KARYA SUMADI

Jakarta, 31 Agustus 2021
INSPEKTUR JENDERAL

GEDE PASEK SUARDIKA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630717 198903 1 002